

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693036/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 3. Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
- 4. Kode/Nama Satker : (693036) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
- Sebesar : Rp. 202.831.000 (DUA RATUS DUA JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.03.BB Program Pembentukan Regulasi
- 135.03.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 202.831.000
Rp. 202.831.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 202.831.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN BANJARMASIN (045) Rp. 202.831.000

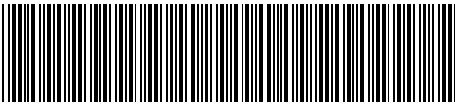
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2288-1858-9627-9288

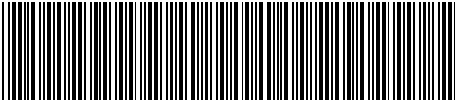
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode>Nama Satker : (693036) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi						202.831.000	
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah						202.831.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				130,00	Rekomendasi Kebijakan	185.476.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah				130.00	Rekomendasi Kebijakan	185.476.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				1,00	Lembaga	12.993.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah				1.00	Lembaga	12.993.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	4.362.000
Rincian Output	:	01	FAE.X01	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah				1.00	Laporan	4.362.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2026
I B. SUMBER DANA



DS:2288-1858-9627-9288

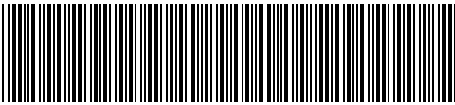
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode>Nama Satker : (693036) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	202.831.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	202.831.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2288-1858-9627-9288

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode>Nama Satker : (693036) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
Kewenangan : (KD)

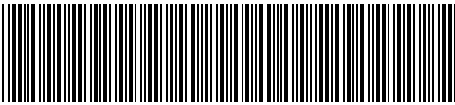
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693036	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN	-	202.831	-	-	-	202.831	15 . 00	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	202.831	-	-	-	202.831		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	202.831	-	-	-	202.831		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (15.00 KALIMANTAN SELATAN / KALIMANTAN SELATAN)	-	185.476	-	-	-	185.476		
01	RM	-	185.476	-	-	-	185.476		
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (15.00 KALIMANTAN SELATAN / KALIMANTAN SELATAN)	-	12.993	-	-	-	12.993		
01	RM	-	12.993	-	-	-	12.993		
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (15.00 KALIMANTAN SELATAN / KALIMANTAN SELATAN)	-	4.362	-	-	-	4.362		
01	RM	-	4.362	-	-	-	4.362	045	
JUMLAH		-	202.831	-	-	-	202.831		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2288-1858-9627-9288

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693036) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

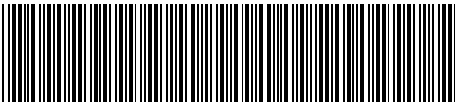
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693036	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	20.000	20.000	20.000	20.000	31.000	20.000	25.993	15.476	10.000	10.362	10.000	202.831
		BELANJA BARANG	0	20.000	20.000	20.000	20.000	31.000	20.000	25.993	15.476	10.000	10.362	10.000	202.831
		Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	20.000	20.000	20.000	20.000	31.000	20.000	25.993	15.476	10.000	10.362	10.000	202.831
135.03.BB.7129		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	20.000	20.000	20.000	20.000	31.000	20.000	25.993	15.476	10.000	10.362	10.000	202.831

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2026
IV A. B L O K I R



DS:2288-1858-9627-9288

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693036] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

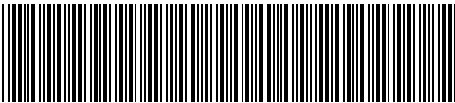
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2026
IV B. C A T A T A N



DS:2288-1858-9627-9288

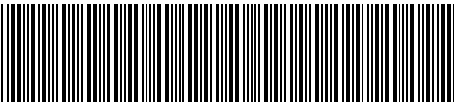
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693036] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693104/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
- 4. Kode>Nama Satker : (693104) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
- Sebesar : Rp. 842.682.000 (DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	842.682.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN BANJARMASIN (045) Rp. 842.682.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

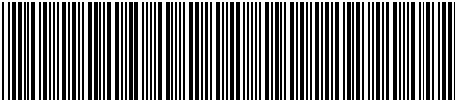
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693104/2026



DS:9406-3605-3444-9162

Satker : (693104) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	24.961.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	24.961.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	817.721.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	817.721.000